

KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas
3.	Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas
4.	Nama PPTK	Eka Mardiyanta, S.Sos., M.Si
5.	Dasar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
6.	Latar belakang	Guna kelancaran dan ketertiban administrasi dalam proses Hibah Keuangan kepada Instansi Vertikal/Badan/Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan dan Melakukan Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Instansi Vertikal /Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan agar dapat tepat sasaran dan memfasilitasi ormas dalam melaksanakan kegiatan.
5.	Manfaat / Output	Pelaksanaan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan pelaksanaan kegiatan ormas berjalan dengan baik dan lancar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.	Strategi pencapaian	- Metode : Dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada DPA-SKPD - Jadwal kegiatan : Selama 1 (satu) tahun anggaran
7.	Standart teknis	Rp. 5.491.595.000
8.	Sumber pendanaan	Anggaran Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar Tahun 2026
9.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program pemberdayaan dan pengawasan ormas Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar Tahun 2026

Karanganyar, 14 Januari 2026
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BIDANG II



EKA MARDIYANTA, S.SOS., M.SI
Pembina
NIP. 19700831 199103 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3.	Kegiatan	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilu kepala daerah, serta pemantauan situasi politik
4.	Nama PPTK	Eka Mardiyanta, S.Sos., M.Si.
5.	Dasar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerjaa Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
6.	Latar belakang	Kabupaten Karanganyar dengan luas Wilayah 77.378,63 Ha terdiri dari 17 Kecamatan 162 Desa 15 Kelurahan, yang didalamnya ada berbagai kelompok elemen masyarakat. Pada pemilu tahun 2019 ada 15 Partai Politik peserta pemilu dan ada 7 Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Karanganyar, hal tersebut tentu tidak menutup kemungkinan adanya silang pendapat atau gesekan antar pendukung, maka perlu dilaksanakan pemantauan perkembangan politik daerah sehingga dapat terpantau sampai sejauh mana perkembangan politik di masyarakat Kab. Karanganyar.
5.	Manfaat / Output	Terpantaunya Perkembangan situasi Politik di wilayah Kabupaten Karanganyar dan dapat terwujudnya perkembangan politik yang Kondusif di masyarakat melalui kegiatan pemantauan perkembangan politik.
6.	Strategi pencapaian	- Metode : Dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada DPA-SKPD - Jadwal kegiatan : Selama 1 (satu) tahun anggaran
7.	Standart teknis	Rp. 5.800.000
8.	Sumber	Anggaran Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar Tahun 2026
9.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar Tahun 2026

Karanganyar, 14 Januari 2026

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BIDANG II

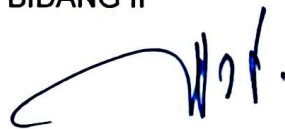


EKA MARDIYANTA, S.SOS., M.SI
Pembina
NIP. 19700831 199103 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Peningkatan Peran Partai Politik
3.	Kegiatan	Asistensi Bantuan Partai Politik
4.	Nama PPTK	Eka Mardiyanta, S.Sos., M.Si.
5.	Dasar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
6.	Latar belakang	Guna meningkatkan kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar, perlu adanya kegiatan Asistensi Bantuan Partai Politik melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karanganyar
5.	Manfaat / Output	Meningkatkan kegiatan Pendidikan politik masyarakat dan Meningkatnya kualitas kinerja Partai politik semagai mitra pemerintahan.
6.	Strategi pencapaian	- Metode : Dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada DPA-SKPD - Jadwal kegiatan : Selama 1 (satu) tahun anggaran
7.	Standart teknis	Rp. 75.000.000
8.	Sumber pendanaan	Anggaran Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar Tahun 2026
9.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program penguatan politik dalam negeri dan kemasyarakatan kegiatan asistensi bantuan parpol Badan Kesbangpol Kab. Karanganyar Tahun 2026

Karanganyar, 14 Januari 2026
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BIDANG II

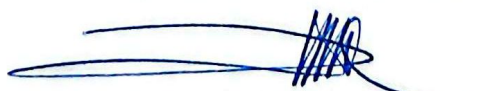


EKA MARDIYANTA, S.SOS., M.SI
Pembina
NIP. 19700831 199103 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Penguatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
3.	Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
4.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
5.	Nama PPTK	Iwan Endroyono, S.Sos., M.M
6.	Dasar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sebagai upaya melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban wilayah melalui fungsi kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial
8.	Manfaat Output	• Situasi daerah tetap aman • Mempererat kerjasama dengan stakeholder terkait • Meningkatnya kewaspadaan di lingkungan masyarakat
9.	Strategi pencapaian	Metode : Dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada DPA-SKPD Jadwal kegiatan : Selama 1 (satu) tahun anggaran
10.	Standart teknis	Laporan pemetaan / mapping daerah rawan konflik terlaksana dengan baik
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebesar 349.600.000
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penguatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Karanganyar, 2 Januari 2026
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang
 Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

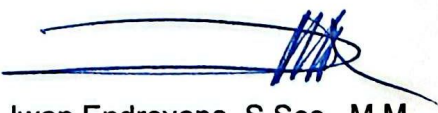


Iwan Endroyono, S.Sos., M.M.
 NIP. 19700720 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Penguatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
3.	Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
4.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
5.	Nama PPTK	Iwan Endroyono, S.Sos., M.M
6.	Dasar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial sebagai upaya melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban wilayah melalui fungsi kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial
8.	Manfaat Output	• Situasi daerah tetap aman • Mempererat kerjasama dengan stakeholder terkait • Meningkatnya kewaspadaan di lingkungan masyarakat
9.	Strategi pencapaian	Metode : Dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada DPA-SKPD Jadwal kegiatan : Selama 1 (satu) tahun anggaran
10.	Standart teknis	Fasilitas PAM dan Kegiatan Rawan Konflik
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebesar 290.000.000
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penguatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

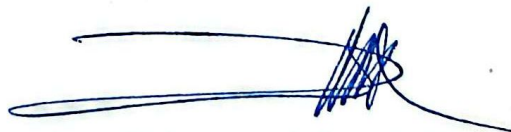
Karanganyar, 2 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang
Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik


 Iwan Endroyono, S.Sos., M.M.
 Nip. 19700720 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Penguatan Kewaspadaan Daerah dan Ketahanan Masyarakat
3.	Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
4.	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Nama PPTK	Iwan Endroyono, S.Sos., MM
6.	Dasar	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerjaa Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai upaya perumusan kebijakan pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban wilayah melalui fungsi kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial
8.	Manfaat / Output	• Meningkatkan koordinasi dan sinergitas forkopimda • Menciptakan kondusifitas daerah • Meningkatnya kewaspadaan di lingkungan masyarakat
9.	Strategi pencapaian	Metode : Dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan mengacu pada DPA-SKPD Jadwal kegiatan : Selama 1 (satu) tahun anggaran
10.	Standart teknis	Laporan koordinasi penanganan konflik terlaksana dengan baik
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebesar 160.000.000
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Th 2026.

Karanganyar, 2 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang
Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik



Iwan Endroyono, S.Sos., M.M.
Nip. 19700720 199903 1 005



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3.	Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
4.	Nama PPTK	Agus Kandiawan, S.H., M.M
5.	Dasar	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
6.	Latar belakang	Penyalahgunaan narkoba terbukti telah merusak masa depan bangsa. Di negara manapun narkoba memiliki daya rusak luar biasa. Merusak karakter manusia, merusak fisik, kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi besar melemahkan kehidupan masyarakat dan Negara. Dengan daya rusak seperti itu, kejahatan narkoba ini bisa digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan serius. Terlebih lagi, kejahatan narkoba bersifat lintas negara dan terorganisasi, sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan bersama secara serius dan mendesak.
5.	Manfaat / Output	➤ Terasilitasinya kegiatan P4GN Tahun 2026 ➤ Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Narkotika
6.	Strategi pencapaian	➤ Metode : Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Sosialisasi kepada masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan tentang Narkotika ➤ Jadwal kegiatan : Bulan Januari s.d Oktober 2026

7.	Standart teknis	Melakukan penyuluhan tentang narkoba kepada masyarakat, pelajar dan generasi muda dengan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim P4GN Kabupaten Karanganyar
8.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026
9.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026

Karanganyar, Januari 2026
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BIDANG I



AGUS KANDIAWAN, S.H., M.M
NIP.19700827 199703 1 003



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3.	Kegiatan	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantaban Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
4.	Sub. Kegiatan	Pembentukan Paskibraka
5.	Nama PPTK	Agus Kandiawan, SH., MM
6.	Dasar	➤ Perpres No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ➤ Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
7.	Latar belakang	Paskibraka merupakan Pasukan Pengibar Bendera yang dilaksanakan oleh generasi muda yakni siswa-siswi yang ada di sekolah. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan, antara lain : Peraturan Baris Berbaris (PBB), Tata Upacara Bendera (TUB), serta latihan Kepemimpinan Siswa tingkat perintis dan pemula. Setiap tahun akan diadakan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk mengibarkan Bendera Merah Putih memperingati HUT RI yang di peringati pada 17 Agustus. Beberapa sekolah se Kabupaten Karanganyar mengirim siswa-siswi terbaik untuk mengikuti seleksi Paskibraka. Setiap calon Paskibraka harus memiliki fisik dan kesehatan yang prima, selain itu seorang Anggota Paskibraka juga harus memiliki rasa Nasionalisme, Wawasan, Pengetahuan, Ketrampilan dan Kedisiplinan yang tinggi. Oleh karena itu seleksi Paskibraka sangat penting untuk upacara nantinya dapat berjalan dengan baik, diharapkan kegiatan seleksi anggota Paskibraka dilakukan dengan penuh Kesungguhan dan seobyektif mungkin, agar hasil yang didapat benar-benar berkualitas dan sukses membawa misi sebagai anggota Paskibraka dan ikut menghaurumkan nama Sekolah, nama Daerah bahkan Nama Bangsa.

8.	Manfaat / Output	➤ Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Tahun 2026 ➤ Meningkatnya Wawasan Kebangsaan bagi siswa-siswi anggota Paskibraka ➤ Terlaksanakannya Pengibaran Bendera Merah Putih pada Upacara HUT RI ke-81 Kabupaten Karanganyar
9.	Strategi pencapaian	➤ Metode : Koordinasi dengan Instansi terkait tentang pembentukan Paskibraka dalam rangka pelaksanaan Pengibaran Bendera Merah Putih pada HUT RI ke 81 Kabupaten Karanganyar tahun 2026 ➤ Jadwal Kegiatan : Bulan Januari s/d Agustus 2026
10.	Standart teknis	➤ Melakukan Seleksi Calon anggota Paskibraka ➤ Melakukan Pelatihan Baris berbaris dan pelatihan Pengibaran Bendera
8.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tahun 2026
9.	Penutup	Demikian Kerangka Acuan Kerja Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar tahun 2026

Karanganyar, Januari 2026
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN
BIDANG I



AGUS KANDIAWAN, S.H., M.M
NIP.19700827 199703 1 003



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
3.	Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
4.	Nama PPTK	Agus Kandiawan, S.H., M.M
5.	Dasar	➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah ➤ Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No 43 dan No 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ➤ PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan ➤ TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran partai komunis indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme
6.	Latar belakang	Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kemajemukan yang dimiliki Indonesia seringkali menyebabkan pertikaian di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara, kita harus menjaga Indonesia dari berbagai konflik karena kondisi masyarakat yang majemuk dengan meningkatkan wawasan kebangsaan sehingga melahirkan sifat nasionalisme. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Salah satunya dengan

		menanamkan nilai-nilai kebangsaan, jiwa patriotik kepada masyarakat dan mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
5.	Manfaat / Output	➤ Terjadilannya hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 ➤ Tersedianya data jumlah eks G 30 S / PKI
6.	Strategi pencapaian	➤ Metode : Koordinasi dengan Instansi terkait dan melaksanakan Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan kepada masyarakat. ➤ Jadwal kegiatan : Bulan Januari s.d Desember 2026
7.	Standart teknis	➤ Melakukan penyuluhan wawasan kebangsaan kepada masyarakat ➤ Menyusun laporan jumlah eks G 30 S / PKI
8.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
9.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Karanganyar, Januari 2026
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN
BIDANG I

AGUS KANDIAWAN, S.H., M.M
NIP.19700827 199703 1 003



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.	Nama PPTK	Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2026 Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Penyusunan dokumen dlm OPD merupakan hal yg penting. Dimulai dari penyusunan perencanaan, kemudian penyusunan anggaran dan terakhir kegiatan evaluasi kegiatan Sehingga didapatkan kegiatan yg menyasar pada tujuan OPD & menjadi kegiatan yang efektif & efisien. YG menjadi pedoman dalam penyusunan kegiatan tahun berikutnya.
8.	Manfaat / Output	- Mendapatkan data yang valid tentang rencana : kegiatan, besaran anggaran ; - Mempermudah koordinasi kegiatan antar bidang ; - Membuat penjadwalan kegiatan guna menghindari kegiatan yang bersamaan antar bidang ; - Mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan. Mengurangi resiko kegiatan tidak mencapai sasaran. - Tidak mengulangi kesalahan untuk kegiatan tahun berikutnya - Mengetahui target capaian.
9.	Strategi pencapaian	- Metode : Dilaksanakan sesuai kebutuhan dalam penyusunan rencana kegiatan - Jadwal kegiatan : insidentil
10.	Standart teknis	Inisiatif kegiatan adalah sekretraris guna mendapatkan data valid dalam menyusun rencana kegiatan tahun yang bersangkutan. RKA dan DPA Tahun 2026.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Perencanaan,

		Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
--	--	---

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sekretariat



Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.	Nama PPTK	Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Gaji dan tunjangan ASN merupakan kegiatan rutin yang setiap bulan harus diberikan kepada ASN. Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkewajiban untuk memberikannya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.
8.	Manfaat / Output	- Memberikan hak pegawai ; - Dengan pemberian hak tersebut, pegawai wajib melaksanakan kewajiban sebagai ASN ; - Serapan anggaran sesuai dengan jadwal ; - Kegiatan OPD berjalan dengan baik.
9.	Strategi pencapaian	- Metode : Dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembayaran gaji pegawai dan dilakukan oleh pembuat daftar gaji - Jadwal kegiatan : Setiap bulan pada tanggal 1
10.	Standart teknis	Dilaksanakan oleh personil yang ditunjuk sebagai pembuat daftar gaji dengan SK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar. Pencairan gaji tidak terlambat.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Karanganyar, 02 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan
Sekretariat

Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
5.	Nama PPTK	Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2026 Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Komponen adl listrik hal vital untuk pelaksanaan tugas. Gua memperpanjang usia pemakaian & memberi rasa aman dalam bekerja kepada karyawan kantor sehingga perlu disediakan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
8.	Manfaat / Output	- Pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar ; - Memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan ; - Memperpanjang usia pemakaian jaringan listrik ; - Menghemat biaya akibat kerusakan.
9.	Strategi pencapaian	- Metode : Dilaksanakan secara berkala dan jika ada kerusakan / gangguan dalam instalasi listrik/penerangan kantor - Jadwal kegiatan : Rutin dan setiap ada kerusakan/gangguan
10.	Standart teknis	Tidak ada jaringan listrik yang mengalami gangguan dan kebutuhan akan penerangan tercukupi.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Th 2026.

Karanganyar, 12 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sekretariat

Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.	Nama PPTK	Herizal Kharisma Arif, S.Kom.
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan guna memberikan rasa nyaman serta untuk menjaga kebersihan kantor.
8.	Manfaat / Output	- Merupakan sarana penunjang kegiatan administrasi ; - Memperlancar pelaksanaan kegiatan perkantoran ; - Mencukupi sarana dan prasarana administrasi ;
9.	Strategi pencapaian	- Metode : Dilaksanakan secara berkala setelah stok barang habis - Jadwal kegiatan : Memesan barang saat dirasa membutuhkan dan jika persediaan sudah habis.
10.	Standart teknis	Pengurus barang melaporkan secara lisan ke PPTK bahwa persediaan barang sudah habis dan harus segera memesan ke pihak ke 3 (tiga). Barang yang dipesan tepat pengiriman dan tepat pesanan.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sekretariat

Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.	Nama PPTK	Herizal Kharisma Arif, S.Kom
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Barang cetak diperlukan guna memberikan identitas OPD. Juga dalam memperlancar administrasi surat menyurat. Ini penting mengingat saat ini, kegiatan pengarsipan surat di Bakesbangpol sedang dilaksanakan. Penggandaan diperlukan guna mempercepat penyelesaian tugas. Selain menghemat waktu juga bisa memperkecil kerusakan alat cetak kantor. Membuat MMT, agar bisa berperan aktif dalam setiap kegiatan peringatan hari hari besar.
8	Manfaat / Output	- Tersedianya barang cetak, penggandaan dan MMT kantor ; - Memberikan identitas OPD ; - Legalistas OPD ; - Memperlancar dan mempercepat pelaksanaan kegiatan perkantoran - Menghemat biaya penggandaan dibandingkan harus diperbanyak dengan menggunakan mesin foto copy - Memperpanjang usia printer OPD ; - Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan baik tingkat local maupun nasional seperti ucapan pada peringatan hari-hari tertentu;
9.	Strategi pencapaian	- Metode : Pembelian/pembuatan lewat GU. - Jadwal kegiatan : Pemesanan dilaksanakan pada saat barang mulai menipis persediaanya ; Untuk penggandaan dilakukan saat membutuhkan penggandaan dalam jumlah banyak dan tidak dimungkinkan menggunakan printer kantor ; MMT dipesan jika ada himbauan pemasangan MMT ;
10.	Standart teknis	Pengurus barang melaporkan persediaan barang cetak

		menipis ke PPTK dan melaksanakan pemesanan barang yang dibutuhkan ; Untuk pengadaan dilakukan dengan buku kendali dan mencatat berapa banyak penggandaannya Untuk MMT, ada surat perintah untuk memasang MMT dan jika dirasakan perlu.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Th 2026.

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sekretariat



Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.	Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.	Nama PPTK	Henrizal Kharisma Arif, S.Kom
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Asas kepatutan dalam menyambut tamu menjadi perhatian . Pemberian fasilitasi kunjungan tamu diberikan supaya kegiatan pemberian jamuan kepada tamu bisa lebih focus tidak berbenturan dengan kegiatan rapat.
8.	Manfaat / Output	- Layak dalam memberikan jamuan kepada tamu ; - Terpisah kegiatan antara jamuan tamu dan rapat ; - Lebih mudah dalam pertanggungjawaban ;
9.	Strategi pencapaian	Hidangan disajikan untuk tamu yang berkunjung dalam rangka konsultasi/studi banding.
10.	Standart teknis	Memesan kepada pihak ke tiga sebagai penyedia catering.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Th 2026.

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sekretariat

Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5.	Nama PPTK	Herizal Kharisma Arif, S.Kom.
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Listrik dan telepon adalah hal yang mutlak dalam kegiatan perkantoran.
8.	Manfaat / Output	- pekerjaan kantor bisa berjalan dengan lancar ; - komunikasi antar OPD baik didalam daerah maupun diluar daerah bisa berjalan baik ; - mempercepat komunikasi dengan OPD lain, sehingga bisa efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya
9.	Strategi pencapaian	Membayar rutin setiap bulan dan diusahakan tidak terlambat dengan transfer.
10.	Standart teknis	Rutin dibayarkan kepada pihak penyedia jasa guna menghindari denda
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pada SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Th 2026.

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sekretariat

Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.	Nama PPTK	Herizal Kharisma Arif, S.Kom.
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah PNS, menyebabkan tugas di sekretariat sedikit terhambat. Untuk itu butuh tenaga guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas.
8.	Manfaat Output	- Kelancaran administrasi kantor ; - Terjaga kebersihan kantor ; - Keamanan kantor terjaga ; - Tersedianya jasa driver bagi kepala badan.
9.	Strategi pencapaian	Membagi tugas kepada personil dan tetap melakukan pengecekan. Setiap tahun memperbaharui kontrak untuk personil tersebut.
10.	Standart teknis	Pekerjaan yang diberikan selesai dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran. Mengecek jam kerja, kehadiran dan pulang setiap harinya (absensi menggunakan aplikasi "aku hadir")
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Th 2026.

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sekretariat

Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Demak, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar, Jawa Tengah 57712

Telepon (0271) 495038, Laman kesbangpol.karanganyarkab.go.id

Pos-el kesbangpolkaranganyar@karanganyarkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5.	Nama PPTK	Herizal Kharisma Arif, S.Kom
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mobilitas pelaksanaan tugas adalah kendaraan dinas. Untuk itu diperlukan anggaran dalam rangka memelihara kendaraan dinas tersebut. Anggaran ini diantaranya : pemeliharaan kendaraan dinas, pajak tahunan kendaraan dinas operasional, dan juga pembelian BBM per bulan.
8.	Manfaat / Output	- Pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien - Kendaraan dinas operasional terpelihara dan aman saat digunakan serta memperpanjang masa pakai. - Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
9.	Strategi pencapaian	Mengecek waktu pajak kendaraan ; Melaksanakan pemeliharaan rutin sesuai dengan kebutuhan
10.	Standart teknis	Bekerja sama dengan pihak ke-tiga yaitu bengkel untuk pemeliharaan kendaraan bisa terpantau dengan baik. Memberikan jatah rutin pemeliharaan kendaraan kepada pejabat struktural dengan cara transfer.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pada SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan
Sekretariat



Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Mebel
5.	Nama PPTK	Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Pemeliharaan mebel adalah hal yang perlu dilakukan, agar masa pakai menjadi lebih lama. Selain menjadikan nyaman dan rapi saat dipakai, pemeliharaan mebel, berguna dalam menghemat anggaran agar tidak harus mengadakan mebel baru.
8.	Manfaat / Output	- Memperpanjang waktu pemakaian mebel. - Memberi rasa nyaman kepada karyawan - Menjadikan kantor rapi dan indah - Efektif dan efisien dalam hal anggaran
9.	Strategi pencapaian	Mendata mebel yang masih bisa diperbaiki dan harus dihapuskan. Menghubungi pihak ke 3 yang bisa memperbaiki mebel.
10.	Standart teknis	Mebel yang diperbaiki harus bisa digunakan, aman dan nyaman. Serta mempunyai nilai pakai lebih dari 5 tahun.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Pemeliharaan Mebel pada SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan
Sekretariat

Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.	Nama PPTK	Henrizal Kharisma Arif. S.Kom.
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah sangat diperlukan untuk memperlancar pekerjaan kantor sehingga bisa selesai dengan tepat waktu dan tidak terhambat. Service rutin perlu diperlukan setiap periode.
8.	Manfaat / Output	- Mendukung kelancaran pekerjaan ; - Memperpanjang masa pemakaian peralatan kantor ; - Efektif dan efisien dalam penggunaan peralatan kantor ; - Memberikan rasa aman kepada karyawan.
9.	Strategi pencapaian	Secara rutin mengecek kondisi peralatan dan mesin kantor.
10.	Standart teknis	Bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Th 2026.

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sekretariat

Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006



KERANGKA ACUAN KERJA

1.	Nama OPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar
2.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.	Sub Kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.	Nama PPTK	Henrizal Kharisma Arif. S.Kom.
6.	Dasar	Dokumen Penetapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar.
7.	Latar belakang	Pemeliharaan atau rehabilitasi bangunan kantor yang secara rutin perlu diperlihara.
8.	Manfaat / Output	- Mendukung kelancaran pekerjaan ; - Memperpanjang masa pemakaian gedung kantor ; - Efektif dan efisien dalam penggunaan gedung kantor ; - Memberikan rasa aman kepada karyawan.
9.	Strategi pencapaian	Secara rutin mengecek kondisi gedung kantor.
10.	Standart teknis	Bekerja sama dengan pihak ketiga yang bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan peralatan dan mesin kantor.
11.	Sumber pendanaan	Anggaran Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2026.
12.	Penutup	Demikian kerangka acuan kerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada SKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Th 2026.

Karanganyar, 20 Januari 2026
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sekretariat

Henrizal Kharisma Arif, S.Kom.
NIP. 198603262019031006